



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI BRASIL
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Mengingat hubungan yang bersahabat antara kedua Negara;

Berkeinginan untuk memperkuat lebih lanjut hubungan tersebut, atas **dasar timbal balik**, dengan memberi fasilitas masuk ke Negara masing-masing kepada **warga Negara Indonesia dan Brasil**;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

Warga Negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, transit dan tinggal dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari secara keseluruhan atas dasar persetujuan dari negara tuan rumah dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lain.

**PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR**

Jangka waktu paspor yang berlaku dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya adalah 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

PASAL 3 PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang berlaku dari masing-masing Pihak yang merujuk kepada Persetujuan ini dapat memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang diijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku, sebagaimana telah disebut di atas.

PASAL 4 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara dari masing-masing Pihak yang memegang paspor yang berlaku, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal I Persetujuan ini dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga, disyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari Kedutaan Besar Pihak lain.

PASAL 5 HAK PIHAK BERWENANG

1. Warga Negara masing-masing Pihak harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama berada di wilayah Negara tuan rumah.
2. Para Pihak harus saling memberitahukan satu sama lain setiap adanya perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masuk, keluar, transit dan tinggal bagi orang asing yang terkait dengan Persetujuan ini.
3. Persetujuan ini tidak akan membatasi hak masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau memperpendek masa tinggal Warga Negara Pihak lainnya yang dianggap tidak dikehendaki.

PASAL 6 PENUNDAAN

1. Masing-masing Pihak dapat menunda sementara waktu secara keseluruhan atau sebagian, berlakunya Persetujuan ini, dengan alasan kemananan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan masyarakat.
2. Berlakunya kembali maupun berakhirnya tidakn sebagaimana disebutkan dalam ayat Pasal ini harus diberitahukan secara layak kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Kedua Pihak harus saling melakukan pertukaran, contoh paspor yang berlaku yang digunakan oleh masing-masing Pihak melalui saluran diplomatik dalam kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Dalam hal adanya penerbitan paspor diplomatik dan paspor dinas atau perubahan yang menggantikan paspor yang lama, Kedua Pihak harus saling menyerahkan satu sama, melalui saluran diplomatik, contoh paspor, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuannya.
3. Jika seorang Warga Negara dari masing-masing Pihak kehilangan paspor diplomatik atau dinas di dalam wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak berwenang dari negara tuan rumah untuk tindakan yang layak. Misi Diplomatik atau Konsulat yang bersangkutan harus mengeluarkan sebuah paspor baru atau dokumen perjalanan kepada Warga Negaranya tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara tuan rumah.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara para Pihak.

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diamandemen atau diperbaiki, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh para Pihak. Amandemen dan perbaikan demikian akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

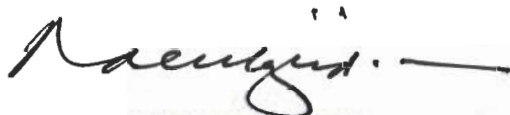
1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan nasional masing-masing telah dipenuhi.
2. Perjanjian ini akan tetap berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis melalui saluran diplomatik.

3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan kepada Pihak lain secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai pengakhiran tersebut, melalui saluran diplomatik, 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2008, masing-masing secara rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



DR. N. HASSAN WIRAJUDA
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FEDERASI BRASIL**



CELSO AMORIM
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

**ACORDO
ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA
E
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SOBRE
A ISENÇÃO DE VISTOS PARA PORTADORES DE PASSAPORTES
DIPLOMÁTICOS E OFICIAIS OU DE SERVIÇO**

O Governo da República da Indonésia e O Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominados "Partes"),

Considerando os laços de amizade entre os dois países;

Desejando fortalecer estes laços, em base recíproca, ao facilitar as viagens entre os seus territórios de nacionais da Indonésia e do Brasil;

Considerando ainda as leis e os regulamentos existentes em seus respectivos países,

Acordam o seguinte:

**ARTIGO 1
ISENÇÃO DE VISTOS**

Os nacionais das Partes, portadores de passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço válidos, estarão isentos de visto para entrar, transitar e permanecer no território da outra Parte por um período de até quatorze (14) dias, contados da data de entrada, com extensão possível de até trinta (30) dias, no total, deste que aprovado pelo país anfitrião e mediante solicitação por escrito de missão diplomática ou repartição consular da outra Parte.

**ARTIGO 2
VALIDADE DO PASSAPORTE**

Os nacionais das Partes portarão um passaporte com validade de pelo menos 6 (seis) meses no momento de entrada no território da outra Parte.

ARTIGO 3 RESTRIÇÃO DO VISTO

Os portadores dos passaportes válidos das Partes referidas neste Acordo poderão entrar e sair do território da outra Parte através dos pontos abertos para tal fim pelas autoridades de imigração competentes, sem quaisquer restrições, salvo pelas estipuladas nos regulamentos sanitários, de segurança, de migração, da alfândega e de outros que podem ser legalmente aplicáveis aos portadores dos passaportes mencionados.

ARTIGO 4 VISTO PARA OS MEMBROS DE MISSÕES DIPLOMÁTICAS OU REPARTIÇÕES CONSULARES

Os nacionais das Partes, portadores de passaportes válidos, referidos no Artigo 1 deste Acordo e acreditados como membros de Missão Diplomática ou Representação Consular no território da outra Parte, bem como os membros de sua família, deverão obter o visto apropriado na Embaixada da outra Parte.

ARTIGO 5 DIREITO DAS AUTORIDADES

1. Os nacionais das Partes respeitarão a legislação vigente no território da outra Parte durante a sua estada
2. As Partes informarão reciprocamente sobre mudanças nas suas leis e regulamentos relativos a entrada, saída, transito e permanência de estrangeiros relacionados a este Acordo.
3. Este Acordo não cerceia o direito de cada Parte de recusar a entrada ou abreviar a permanência de cidadãos da outra Parte considerados indesejáveis.

ARTIGO 6 SUSPENSÃO

1. Por razões de segurança, ordem ou saúde pública, qualquer das Partes poderá suspender a aplicação deste Acordo total ou parcialmente.
2. A adoção e o término desta medida será devidamente notificada à outra Parte por via diplomática.

ARTIGO 7
EXEMPLARES E EMISSÃO DE PASSAPORTES
OU DOCUMENTOS DE VIAGEM

1. As Partes intercambiarão, por via diplomática, exemplares de seus passaportes válidos utilizados pelas Partes em um prazo máximo de trinta (30) dias após a data de assinatura deste Acordo.
2. Caso haja introdução de novos passaportes diplomáticos e oficiais ou de serviço ou, em caso de modificação dos passaportes existentes, as Partes intercambiarão, por via diplomática, exemplares destes passaportes, com a antecedência mínima de trinta (30) dias da data de sua entrada em circulação.
3. No caso de o nacional de uma das Partes perder, no território da outra Parte, o passaporte diplomático e oficial ou de serviço, ele informará as autoridades competentes deste país para as medidas cabíveis. A missão diplomática ou repartição consulado emitirá um novo passaporte ou documento de viagem ao referido nacional e informará as autoridades competentes do país anfitrião.

ARTIGO 8
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

As eventuais disputas ou divergências decorrentes da interpretação ou implementação das disposições deste Acordo serão resolvidas amigavelmente por meio de consultas ou negociação entre as Partes.

ARTIGO 9
EMENDAS

Caso necessário, o presente Acordo poderá ser objeto de emendas ou alterações, mediante o mútuo consentimento das Partes por escrito. As modificações e emendas entrarão em vigor na data que for determinada pelas Partes.

ARTIGO 10
ENTRADA EM VIGOR, VIGÊNCIA E DENÚNCIA

1. Este Acordo entrará em vigor trinta (30) dias após o recebimento da segunda Nota diplomática em que uma Parte informa à outra do cumprimento de todos os respectivos requisitos legais para sua entrada em vigor.
2. Este Acordo vigorará por um período de 5 (cinco) e poderá ser anos prorrogado por períodos adicionais de 5 (cinco) anos, mediante comunicação por via diplomática.
3. Qualquer uma das Partes poderá denunciar o presente Acordo por via diplomática, mediante notificação com trinta (30) dias de antecedência da data pretendida da denúncia.

Em testemunho do que, os abaixo assinados celebraram o presente Acordo.

Feito em Jacarta, em 12 de julho de 2008, em dois originais, nos idiomas indonésio, português e inglês, sendo **todos** os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência relativa à interpretação deste Acordo, prevalecerá o texto em inglês.

**PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
DA INDONÉSIA**



DR. N. HASSAN WIRAJUDA
**MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES**

**PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL**



CELSO AMORIM
**MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES**



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ON
VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE
PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Brazil, hereinafter referred to as "The Parties",

CONSIDERING the friendly relations between the two countries;

DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of Indonesia and Brazil into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respecting countries;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

Nationals of either Party, holders of valid diplomatic and official or service passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 14 (fourteen) days from the date of entry, with possible extension maximum 30 (thirty) days in total on the basis of approval of host country and written request from the diplomatic mission or consular post of the other Party.

**ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY**

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3 VISA RESTRICTION

The holders of the valid passports of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of the above-mentioned valid passports.

ARTICLE 4 VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of each Party who are holder of valid passport referred to in Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party.

ARTICLE 5 THE RIGHT OF AUTHORITIES

1. Nationals of either Party shall comply with the laws and regulations in force, during their stay in the territory of the hosting State.
2. The Parties shall inform each other of any changes in their respective laws and regulations concerning entry, exit, transit and stay of foreigners relating to this Agreement.
3. This Agreement does not curtail the right of either Party to deny entry or shorten stay of national of the other Party considered undesirable.

ARTICLE 6 SUSPENSION

1. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to other Party through diplomatic channels.

ARTICLE 7
SAMPLE AND ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT

1. The Parties shall exchange through diplomatic channels, specimens of their valid passport being used by each Party within 30 days after the signing of this Agreement.
2. In case of introduction of new diplomatic and official or service passports or the modification of the existing one, the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of passports, not later than 30 (thirty) days prior to its application.
3. If a national of either Party loses his/her diplomatic or service passport in the territory of the other Party, he/she shall inform the concerned authorities of the host country for appropriate action. The concerned diplomatic mission or consulate shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform the competent authorities of the host country.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the provision of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 9
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment and revision shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day the receipt of last notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of the Agreement as stipulated by their respective national legislation have been met.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further periods of 5 (five) years by mutual consent in writing through diplomatic channel.

3. Either Party may terminate this Agreement by giving to the other Party a written notice of termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to intended date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, has signed the present Agreement.

DONE at Jakarta, on this 12th day of July, in the year 2008, in two originals each in the Indonesian, Portuguese and English languages and all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



DR. N. HASSAN WIRAJUDA
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL**



CELSO AMORIM
MINISTER OF EXTERNAL RELATIONS